

STRENGTHENING BUSINESS CAPITAL OF CULINARY BUSINESS COMMUNITIES IN KARANGANYAR BY OF MICRO FINANCIAL INSTITUTIONS (MFIS)

Ana Shohibul Manshur Al Ahmad¹, Atmaji², Sarjiyanto³, Sinto Sunaryo⁴

^{1,2,3,4} Faculty of Economic and Business, Universitas Sebelas Maret
e-Mail¹: anashohibul@staff.uns.ac.id

Abstract

The purpose of this community service is empowerment and efforts to maintain business sustainability in the culinary business community in Cangakan Karanganyar. Partners in this program are the culinary business community in Cangakan, Karanganyar, who have joined the KUBE (Business Community Group) institution. The main problem faced by Partners is the aspect of capital, most of the members of KUBE Culinary Cangakan are street culinary traders so that prospective creditors are considered not bankable. In financial terms, this business actually has the potential to develop. The method used to solve the problem is assisting the establishment of a Micro Finance Institution (MFIs), as well as empowering community members through financial management and managerial training. The end result of this program is the formation of a healthy Micro Finance Institution from the culinary business community in Cangakan Karanganyar. Through the established Micro Finance Institution (MFIs), it is hoped that it can be a solution in overcoming working capital problems and business sustainability.

Keywords: *working capital; not bankable; Micro Finance Institution (MFIs)*

PENGUATAN MODAL USAHA PADA KOMUNITAS PELAKU USAHA KULINER DI KARANGANYAR MELALUI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM)

Ana Shohibul Manshur Al Ahmad¹, Atmaji², Sarjiyanto³, Sinto Sunaryo⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret

e-Mail¹: anashohibul@staff.uns.ac.id

Abstrak

Tujuan pengabdian ini adalah pemberdayaan dan upaya menjaga keberlanjutan usaha pada komunitas pelaku usaha kuliner di Cangakan Karangnyar. Mitra dalam dalam program ini adalah komunitas pelaku usaha kuliner di Cangakan, Karangnyar yang sudah tergabung dalam kelembagaan KUBE (Kelompok Usaha Bersama). Permasalahan utama yang dihadapi oleh Mitra yaitu aspek permodalan, sebagian besar anggota KUBE Kuliner Cangakan adalah pedagang kuliner kaki-lima sehingga dipandang not-bankable oleh calon kreditur. Secara *financial* sebetulnya usaha ini memiliki potensi untuk berkembang. Metode yang dipakai untuk menyelesaikan masalah adalah pendampingan pembentukan kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), sekaligus pemberdayaan anggota komunitas melalui pelatihan manajemen keuangan dan manajerial. Hasil akhir dari program ini adalah terbentuknya Lembaga Keuangan Mikro yang sehat dari komunitas pelaku usaha kuliner di Cangakan Karangnyar. Melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang terbentuk diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan modal kerja dan keberlanjutan usaha.

Kata kunci: modal kerja; tidak bankable; Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

PENDAHULUAN

Sentra Kuliner memiliki peranan dan pengaruh yang besar terhadap perekonomian di suatu daerah, termasuk di Kabupaten Karanganyar. Peranan sentra kuliner dapat mendorong pembangunan sebuah kawasan industri kecil yang tidak membutuhkan modal yang besar dan mampu menyerap tenaga kerja banyak. Menurut Anoraga dan Sudantoko (2002: 224) sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berkembang menyiratkan adanya potensi yang besar atas kekuatan domestik, jika hal ini dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik tentu akan dapat mewujudkan usaha kecil yang tangguh. Pemberdayaan UMKM adalah salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan multi flayer effect eksistensi UMKM terhadap pembangunan perekonomian disuatu daerah. Pemberdayaan UMKM tersebut, dapat dilakukan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Menurut Sarjiyanto (2017), dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang, sehingga untuk mewujudkan keberlanjutan usaha kuliner di Karanganyar sebagai bagian dari pemberdayaan UMKM diperlukan seperangkat strategi dan upaya dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh UMKM itu sendiri.

Permasalah mendasar yang dihadapi dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia menurut Rofiah (2011) adalah: **pertama**, UMKM di Indonesia mayoritas masih kesulitan dalam mengakses pasar atas produk-produk yang dihasilkannya; **Kedua**, UMKM rata-rata masih lemah dalam hal inovasi, pengembangan

dan penguatan usaha; serta **Ketiga**, UMKM memiliki keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal khususnya dari perbankan. Permasalahan keterbatasan akses sumber-sumber pembiayaan yang dihadapi oleh UMKM khususnya pelaku Usaha Mikro terutama dari lembaga-lembaga keuangan formal seperti perbankan, menyebabkan UMKM bergantung pada sumber-sumber informal. Bentuk dari sumber-sumber ini beraneka ragam mulai dari pelepas uang (*rentenir*) hingga berkembang dalam bentuk unit-unit simpan pinjam, koperasi dan bentuk-bentuk lainnya yang lazim disebut sebagai Lembaga keuangan. Dalam perkembangannya, lembaga keuangan mikro ini lebih mengena di kalangan pelaku UMKM karena sifatnya yang lebih fleksibel, misalnya dalam hal persyaratan dan jumlah pinjaman yang tidak seketat persyaratan perbankan maupun keluwesan pada pencairan kredit.

Pihak yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro umumnya disebut Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Menurut *Asian Development Bank* (ADB), Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposit*), kredit (*loans*), pembayaran berbagai transaksi jasa (*payment services*) serta *money transfers* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil termasuk UMKM. Sedangkan LKM dapat berupa: 1) Lembaga formal misalnya bank desa dan koperasi. 2) Lembaga semi-formal misalnya organisasi non-pemerintah. 3) Sumber-sumber informal misalnya pelepas uang atau rentenir (Simatupang dan Putra, 2019) Namun demikian, hal yang penting yang perlu diingat bahwa pengaruh positif LKM terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi orang miskin hanya akan dapat dipertahankan apabila LKM tersebut memiliki kinerja keuangan dan jangkauan yang baik.

Menurut Novan (2015) ada tiga peranan LKM dalam menciptakan kesejahteraan dan peningkatan ssa ekonomi terhadap masyarakat; 1) LKM dapat meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan melalui penciptaan dan pengembangan usaha mikro. 2) LKM dapat meningkatkan produktivitas dan potensi pendapatan kelompok-kelompok masyarakat yang rentan, terutama perempuan dan orang-orang miskin. 3) LKM dapat mengurangi ketergantungan masyarakat perdesaan terhadap panen yang berisiko gagal karena musim kemarau melalui diversifikasi kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan. Mekanisme pembiayaan yang dilakukan oleh LKM dapat melalui tiga (3) model pinjaman. Model 1, kredit umum/kredit reguler, kredit investasi/modal usaha dan kredit komsumtif, Model 2, Pinjaman Murabahah, Pinjaman Mudharabah, Pinjaman Musyarakah, Pinjaman Ijaroh dan Pinjaman Qardhul Hasan, sebagaimana yang ditawarkan oleh Koperasi berdasarkan prinsip syariah. Model 3, pinjaman Modal Kerja dan pinjaman Jatuh Tempo sebagaimana yang ditawarkan oleh Koperasi berdasarkan prinsip konvensional (Anggraeni dan Herinawati, 2019).

Menurut Damayanti (2018) LKM telah berkembang semenjak diperkenalkan pada tahun 1980-an menjadi sebuah industri keuangan yang telah menarik perhatian dari praktisi, investor, dan masyarakat. LKM menjadi salah satu lembaga/institusi dalam proses intermediasi keuangan. Keberadaan LKM sangat dibutuhkan oleh kelompok masyarakat kecil dan menengah, termasuk oleh UMKM untuk memenuhi konsumsi maupun produksi serta juga menyimpan hasil usaha mereka. Peranan LKM secara kelembagaan diharapkan dapat mencakup dua profil kepentingan, antara sebagai “institusi sosial” yang berpihak kepada masyarakat rentan dan UMKM tanpa memandang status dan kinerja keuangannya bankable atau tidak. LKM sebagai “institusi komersial” harus memperhatikan aspek efisiensi serta efektivitas dalam pelayanan keuangannya kepada masyarakat dan UMKM.

LKM secara kelembagaan harus mampu menjadi salah satu pilar dalam proses intermediasi keuangan pada level mikro. Meski LKM sebagai institusi sosial, tetapi LKM juga mampu menjadi institusi komersial dengan cara meminimalkan biaya transaksi, dan berperan dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam mengkoordinir anggotanya. Karena kedekatan dengan pihak nasabah dan fleksibilitas aturan LKM, dapat menekan biaya-biaya transaksi yang muncul. Kemudian peran dari

KSM diharapkan mampu menekan anggotanya dalam mengamankan pembiayaan, atau penyubstitusi jaminan (*collateral*). LKM secara kelembagaan dipandang mampu menjadi alternatif dan solusi dalam permasalahan akses permodalan oleh pelaku UMKM, yang umumnya membutuhkan pembiayaan sesuai skala dan sifat usaha kecil.

Menurut Utomo (2014) Peranan LKM dalam membantu akses permodalan bagi masyarakat marginal dan UMKM telah banyak dipraktikan di berbagai negara. Salah satu negara yang berhasil menerapkan praktik kelembagaan LKM adalah Bangladesh dengan Grameen Bank. Penggasan tersebut adalah Muhammad Yunus, dengan konsep Grameen Banknya sehingga mendapatkan apresiasi sebagai pemenang Hadiah Nobel untuk Keamanan pada tahun 2006 yang lalu. Muhammad Yunus mendirikan Grameen Bank di Bangladesh pada tahun 1976 setelah bencana kelaparan besar di negara ini. Kini bank ini memiliki 2.226 cabang di 71.371 desa, dengan 6,5 juta orang miskin sebagai nasabahnya dan dicontohkan oleh puluhan negara lain di seluruh dunia (Weber, 2007: 44-75). Lebih lanjut, Utomo (2014) mencontohkan keberhasilan kelembagaan LKM di Amerika Latin yaitu di Negara Venezuela melalui *Accion* yang berdiri awal 1990-an telah melakukan pemberdayaan terhadap orang miskin dengan membekali pengetahuan dan alat dapat meningkatkan kesejahteraannya dan mampu merberdayakan jutaan orang.

Berdasarkan permasalahan akses permodalan yang dihadapi oleh UMKM, khususnya oleh mitra pengabdian masyarakat pada UMKM di sentra kuiner Cangkakan Karangnyar. Serta berdasarkan telaah literatur dan *success story* peranan LKM diberbagai Negara mampu menjadi solusi dalam akses permdaan dan peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi, maka melalui kegiatan pengabdian ini, kami menawarkan konsep pemberdayaan UMKM melalui penguatan permodalan melalui kelembagaan LKM. Menurut Rofiah (2011) banyaknya LKM yang tumbuh dan berkembang di Indonesia menunjukkan bahwa kelembagaan LKM sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, pengusaha kecil dan mikro yang selama ini belum terjangkau oleh jasa pelayanan keuangan perbankan khususnya bank umum.

METODE

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan pada Mitra pengabdian yakni KUBE Kuliner 45 Karangnyar, maka metode pengabdian dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan secara simultan. Sedangkan pendekatan pengabdian yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan kaji-tindakan, Menurut Karsidi (2001) pendekatan kaji-tindak yang merupakan suatu bentuk riset yang memperdayakan masyarakat melalui pengamatan dan tindakan secara langsung pada objek pemberdayaan.

Metode pemberdayaan yang dijalankan ini, pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat dalam hal ini adalah kelompok pelaku usaha kuliner yang tergabung dalam Kube Kuliner 45 Karangnyar dengan berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi aktif dan pembelajaran sosial secara langsung. Adiyoso (2009) menegaskan bahwa kererlibatan aktif masyarakat merupakan elemen terpenting dalam upaya menciptakan kemandirian dan proses pemberdayaan yang sesungguhnya.

Pelatihan dan Pendampingan Penguatan Kelembagaan pembentukan LKM

Sosialisasi tentang Kelembagaan LKM dilakukan dengan beberapa tahapan; pertama diadaknya temu kordinasi antara Tim Pengabdian RG Kearifan Lokal dengan pengurus Kube untuk menyusun rencana



pembentukan kelembagaan LKM Kube Kuliner dan pelatihan tatacara pembentukan serta aspek legalitas lembaga LKM

Gambar 1. Sosialisasi dan Pelatihan Pembentukan LKM oleh Tim Pengabdian FEB UNS

Setelah tersusun draf pengurus dan draf legalitas perijinan LKM, langkah selanjutnya adalah memberikan pelatihan manajemen pengelolaan LKM dan aspek legalitas kelembagaan.



Gambar 2. Proses Diskusi penetapan Rencana Pembentukan LKM oleh Tim dan Pengurus Kube Kuliner 45 Karanganyar

Materi pelatihan yang diberikan dalam rangka menyipakan berdirinya kelembagaan LKM yang handal dan professional antara lain: materi tentang penumbuhan dan pengembangan LKM, manajemen organisasi dan kepersonaliaan, manajemen tabungan anggota dan masyarakat, manajemen kredit dan manajemen keuangan. Sedangkan pelatihan dalam aspek legalitas, materi pelatihan berupa memaparkan dasar-dasar hukum dalam rangka praktik legalitas operasional LKM. Aspek hukum antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro,
- 2) PP Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro,
- 3) POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perijinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro,

- 4) POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro dan
- 5) SEOJK Nomor 29/SEOJK.05/2015 tentang Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro.

Pelatihan ini juga di paparkan dan dijelaskan bagaimana mekanisme pengajuan dan pengukuhan LKM baru sesuai dengan aturan dan persyaratan yang harus di penuhi. Langkah yang harus dilakukan oleh Mitra adalah mengajukan permohonan kepada OJK dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat untuk mendapatkan legalitas dan pendampingan. Gambar 3 dibawah ini adalah merupakan skema alur permohonan perijinan dan pengukuhan pendirian sebuah LKM sebagai salah satu tampilan materi yang disajikan dalam kegiatan pendampingan kepada mitra.



Gambar 3. Materi alur perijinan dan Pengukuhan LKM Baru sesuai POJK terbaru

Materi dan Sasaran Pelatihan

Adapun jenis-jenis Materi yang akan diselenggarakan, dalam rangka membantu Mitra Kube Kuliner 45 di Kelurahan Cangakan Kecamatan/Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut.

No	Materi	Sasaran
1	Manajemen Organisasi	Membuka pola pikir anggota Kube Kuliner 45 untuk menjadi kelompok yang produktif yang sadar akan potensi lingkungannya dengan tetap mempertahankan Kearifan Lokal budaya setempat, khususnya potensi mewujudkan sentra wisata kuliner tradisional di Kawasannya.

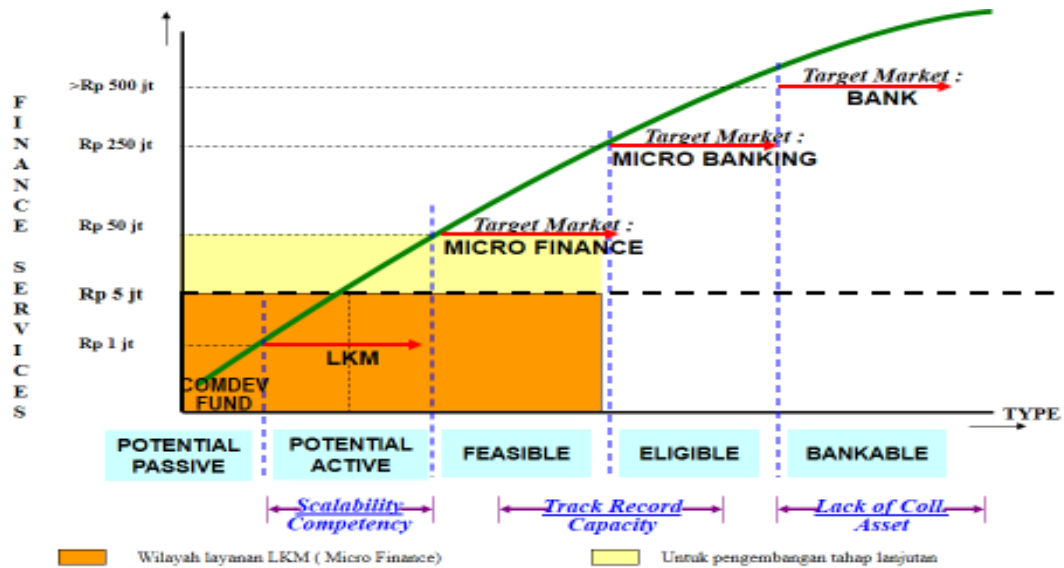
2	Manajemen Keuangan	Para anggota Kube yang hampir semuanya adalah para pengusaha kuliner, maka keterampilan manajerial dan keuangan secara profesional juga perlu disampaikan, disamping menambah keterampilan manajerial dalam pengelolaan keuangan yang lestari
3	Manajemen Kredit	Anggota Kube Kuliner 45 dan Pengelola LKM juga perlu mengenal pengelolaan Kredit dari aspek manajemen keuangan meliputi : perencanaan kebutuhan perhitungan average kredit, dll
4	Manajemen Tabungan dan Investasi	Pelatihan ini diharapkan agar anggota Kube Kuliner 45 dan Pengurus LKM dapat mengimplementasikan konsep investasi dan diversifikasi resiko keuangan menjaga likuiditas, dan kesehatan LKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terbentuknya LKM Sebagai Solusi masalah Permodalan UMKM

Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah munculnya kesadaran dari para pelaku usaha kuliner di Karanganyar, yang telah tergabung dalam KUBE Kuliner 45 Karanganyar akan pentingnya kelembagaan dan pentingnya menghimpun diri dalam sebuah kelompok agar meningkatkan posisi tawar dan dalam mengatasi permasalahan bersama. Salah satu permasalahan adalah masalah permodalan, walaupun secara tradisional mereka sudah menerapkan konsep lembaga keuangan mikro non-formal melalui arisan kelompok. Aspek permodalan melalui konsep lembaga mikro sangat terbuka peluang untuk maju dan profesional jika kelembagaannya dapat ditingkatkan menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang mandiri dan profesional. Jadi hasil target dari pengabdian ini adalah lahirnya LKM dari KUBE Kuliner 45 Karanganyar.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan salah satu alternatif yang tepat dalam mengatasi permasalahan UMKM, khususnya dalam hal permodalan. Karena secara *feasibility* dan *capability* bisnis kuliner yang dijalankan oleh pelaku usaha kuliner di Karanganyar jika akan mendapatkan pendanaan permodalan dari perbankan akan mengalami kesulitan. Sehingga diharapkan lahirnya LKM nanti dapat menjadi salah satu solusi bagi Mitra. LKM yang akan dibentuk juga diharapkan dapat menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan yang lebih tinggi melalui program *linked* dan atau *cancelling* dalam mengakses dana.

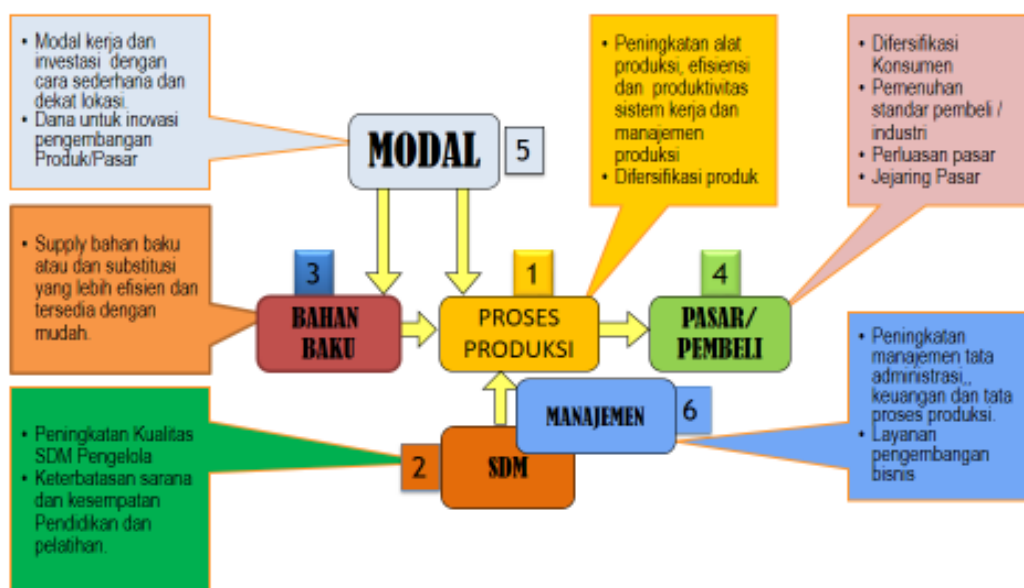


Gambar 4. Peta Potensi peran LKM dalam Pembiayaan UMKM

Peningkatan Kualitas UMKM melalui Program Pengembangan UMKM

Hasil dari pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh Tim Pengabdian, khususnya dalam rangka pengembangan UMKM di daerah adalah melalui 5 pilar pengembangan. Walaupun fokusnya pada aspek permodalan melalui pembentukan LKM, pengabdian ini juga berupaya meningkatkan kualitas para pelaku usaha kuliner di Karangnyar melalui kerangka strategi pengembangan yang ditawarkan.

Kelima kerangka strategi pengembangan UMKM tersebut meliputi; aspek produksi, aspek sumberdaya manusia/pengelolaan, aspek bahan baku, aspek pasar, aspek permodalan. Kelima aspek yang sudah dipetakan menjadi strategi pengembangan UMKM menuju UMKM yang mandiri dan professional tergambar pada gambar di bawah ini:



Gambar 5. Strategi Pengembangan Kelembagaan UMKM menuju UMKM Mandiri

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Pelatihan dan pendampingan kepada kelompok pelaku usaha kuliner di sentra kuliner di Kelurahan Cangkan, Kecamatan/Kabupaten Karanganyar diberikan agar kelompok dapat mengenali dan mengoptimalkan potensi yang dimilikinya yakni sebagai sentra UMKM Kuliner di Karanganyar. Dengan demikian kelompok pelaku usaha ini dapat secara sadar mengupayakan pemberdayaan kelompok dengan cara mengembangkan potensi dan daya kelompok yang dimilikinya.

Pembentukan LKM secara formal dan legal adalah salah satu solusi yang diberikan dalam mengatasi permasalahan dalam aspek permodalan. Melalui LKM tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas baik anggotanya maupun LKM-nya sebagai lembaga keuangan yang dapat beroperasi secara mandiri dan profesional.

Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat ditandai dengan timbulnya keberadaan individu, kelompok dan masyarakat secara luas pasca adanya program pemberdayaan. Sehingga setelah program pemberdayaan ini selesai masyarakat dengan keberadaan dan inisiatifnya terus melakukan inovasi dan kreasi, serta memperkuat relasi kolektifismenya untuk mewujudkan kelompok pelaku usaha yang produktif, maju, mandiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Pemerintah Kelurahan Cangkan, Kube Kuliner 45 Karangnyar dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS yang telah memfasilitasi kerjasama yang baik ini. Ucapan terima kasih juga Kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM-UNS) yang telah memberikan dukungan pendanaa dalam pelaksanaan kegiatan, melalui Hibah Pengabdian Grup Riset dengan Kontra No, 453/UN27.21/PN/2020.

DAFTAR REFERENSI

- Adiyoso, W. (2009). *Menggugat Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Surabaya: ITS Press.
- Anggraeni dan Herlinawati. (2019). Analisis Model Pembiayaan UMKM Melalui Peran Lembaga Keuangan Mikro. *Journal IMAGE*, Vol. 8 No. 1, 21-27. <https://doi.org/10.17509/image.v8i1.23117>
- Anoraga, P dan Djoko Sudantoko, D. (2002). *Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Damayanti, U.R. (2018). Analisis Tingkat Efisiensi Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA). *Tansiq*, Vol. 1 No. 2, 120-137. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tansiq/article/view/3196/1911>
- Karsidi, R. (2001). *Paradigma Baru Penyuluhan Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Dalam Pambudy dan A.K.Adhy (ed.): *Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Menuju Terwujudnya Masyarakat Madani*. Bogor: Penerbit Pustaka Wirausaha Muda.
- Novan G. (2015). Peran Kredit BPR Bank Pasar pada perkembangan UMKM di kota Pontianak. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN*. 4 (4).
- Rofiah, K. (2011). Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo. *Kodifikasia*, Vol. 5 No. 1, 147-168.

- Sarjiyanto. (2017). Peran Kelompok Masyarakat (Kube Lumbung Sinergi) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Warga Desa Bulakan Sukoharjo Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 17 No. 1, 41-54.
- Simatupang A., dan Putra DH. (2019). Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Berdampak Pada Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Jurnal Administrasi Kantor*. Vol. 7 No. 2, 187-200
- Weber, K. (2007). *Muhammad Yunus Creating a World without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism*. New York: Published in the United State by Public Affairs.